

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adawiyah, R. (2023). *Penyelesaian Hubungan Industrial*. Medan: UNPRI PRESS.

Asyhadie, Z. (2015). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Budhiarta, I. N. (2016). *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.

Desasfuryanto, A. &. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: SIK.

Hanafiah, I. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima .

Harahap, A. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Literasi Nusantara.

Harinie, L. T. (2024). *Hubungan Industrial*. Bali: INFES MEDIA.

Hidayat, W. W. (2020). *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*. Banyumas: Pena Persada.

Husni, L. (2012). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Press.

Kusbianto. (2020). *Hukum Perburuhan* . Medan: Enam Media.

Mashudi. (2019). *Sengketa Hubungan Industrial*. Surabaya: CV Jakad Publishing.

Nasihuddin, A. A. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Purwokerto: CV. ELVARETTABUANA

- Pujiastuti, E. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press.
- Rahadi, D. R. (2021). *Hubungan Industrial: Konsep dan Teori*. Tasikmalaya: CV Lentera Imu Madani.
- Sastrohadiwiryo, S. (2015). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Sudarsono. (2011). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, E. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*. Depok: PT RajaGrafinfo Persada.
- Suprihanto, M. S. (2014). *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Susiani, D. (2021). *Hukum Bisnis dan Perusahaan*. Surabaya: Tanta Media Group.
- Viany, E. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Klaten: PT Nas Media Indonesia.
- Vijayantera, I. W. (2022). *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi)*. Denpasar: UNMASS PRESS.

Wijayati, A. (2011). *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*. Surabaya: Lubuk Agung.

Jurnal Artikel

Adianto, J. (2018). Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dalam Menghadapi ASEAN Economy Community. *Jurnal Pendekatan Sosial*, 77-86.

Aditya, F. (2021). Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Proses Mediasi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial. *Media of Law and Sharia*, 272-287.

Agus Wijaya, S. d. (2022). Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *Diponegoro Law Journal*, 1-14.

Andry Sugiantari, S. d. (2016). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang . *Diponegoro Law* , 1-10.

Azhar, K. B. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 20-33.

Berliana, H. G. (2024). Pengaturan Jenis Pekerjaan dan Jangka Waktu Pekerja/Buruh Alih Daya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 359-366.

Fatimah, Y. N. (2015). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh yang Diputus Hubungan Kerja. *Jurnal Pandecta*, 215-232.

- Hunaeni, A. (2016). Masalah Rawan dalam Hubungan Industrial dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum Justisia*, 806-825.
- Josviranto, M. (2022). Tinjauan Yuridis Perusahaan dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Kompetensi*, 165-170.
- Kesuma, I. N. (2020). Perundingan Bipartit sebagai Langkah Awal dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Hukum Saraswati*, 66-79.
- Lismanto. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 416-433.
- Manurung, M. (2018). Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 1-6.
- Mufida, A. S. (2018). Implementasi Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada CV Anugrah Jaya Kab. Bangkalan). *Jurnal Kompetensi*, 144-166.
- Mustafa, D. W. (2022). Efektivitas Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial. *Journal of Law*, 30-44.
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 139-151.

- Samuel, H. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Pekerja Berdasarkan Hubungan Kerja Alih Daya (Outsourcing) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 1-10.
- Sitanggang, T. T. (2024). Implikasi Praktik Outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Aspek Hukum dan Psikologis Pekerja/Buruh. *Journal Legislatif*, 36-57.
- Situmorang, R. L. (2013). Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Kerja Bersama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, 115-122.
- Solechan. (2019). Pengawasan Pelaksanaan Sistem Outsourcing yang Berbasis Pada Hak Asasi Manusia. *Administrative Law & Governance Journal*, 337-348.
- Suhartoyo. (2018). Penguatan Organisasi Pekerja/buruh Sebagai Sarana Perindungan Buruh. *Administrative Law & Governance Journal*, 350-362.
- Utomo, I. S. (2005). Suatu Tinjauan tentang Tenaga Kerja Buruh di Indonesia. *Journal The Winners*, 83-93.
- Yetniwati. (2014). Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Zulhartati, S. (2010). Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 77-88.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan
Perburuhan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta
Tata Kerja Mediasi

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 323/UN7.F1/AK/III/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

17 MAR 2025

Yth. Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Provinsi
Jawa Tengah
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum
(Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Aldi Mulyadi
NIM : 11000121130268
alamat : Jl. Galang Sewu Permai No. 18, Tembalang, Kota Semarang
nomor HP : 0895360425739
bidang minat : Hukum Administrasi Negara
judul skripsi : Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh Alih Daya dalam Hubungan
Industrial (Studi Proses Mediasi pada Balai Pelayanan Penyelesaian
Perselisihan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp. (024) 8316757 Fax. (024) 8316757
SEMARANG – Kode Pos : 50146

Semarang, 10 April 2025

Nomor : 500.10.3.1/5/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Ijin Riset An. Aldi Mulyadi

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
di

Semarang

Menanggapi surat saudara tanggal 17 Maret 2025 Nomor 323/UN7.F1/AK/III/3025 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan kami tidak keberatan mahasiswa atas nama :

No	Nama	NIM	Prodi
1	Aldi Mulyadi	11000121130268	S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Melaksanakan Riset / Penelitian pada Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Disnakertrans
Provinsi Jawa Tengah



ERRY DYAH NURHIDAYAH.S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 197010271997032003

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan)